

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
DASAR DI KECAMATAN SILOKARNO DOGA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA**

**MARKUS WANTIK  
JOORIE. M. RURU  
RULLY MAMBO**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Partisipasi masyarakat dilihat dari empat dimensi partisipasi dalam pendidikan yaitu derajat partisipasi, prakarsa partisipasi, organisasi partisipasi, dan sikap dalam partisipasi. Informan penelitian adalah kepala sekolah dasar, ketua komite sekolah dasar, kepala desa, tokoh masyarakat/agama, dan masyarakat orang tua murid sekolah dasar. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Derajat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar masih rendah, baik dalam hal memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga maupun sumbangan material. Keterlibatan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan masih terbatas pada sebagian kecil masyarakat yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagian orang tua murid. (2) Prakarsa keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar secara spontan dan karena persuasif masih rendah pada masyarakat umum namun sudah cukup baik pada tokoh masyarakat/agama/adat, dan pada sebagian orang tua murid di sekolah tersebut. (3) Organisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar masih rendah baik secara perorangan maupun secara kelompok. (4) Sikap keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan juga masih rendah seperti dalam hal mendukung, menyetujui, ataupun menolak program-program yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau komite sekolah.

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pelaksanaan Pendidikan Dasar**

**Abstract**

*The purpose of this research is to learn how to divide the community in the implementation of primary school education in the Silokarno Doga District, Jayawijaya Regency. This study used descriptive qualitative method. Community participation can be seen from the four dimensions of participation in education, namely the degree of participation, participation initiatives, organizational participation, and attitudes in participation. Informants of the study are the principal of the school, head of the primary school board, village head, community / religious leaders, and parents of elementary school students. . Data collection uses interviews, while the analysis technique used is interactive model analysis. The results showed: (1) The degree of community participation in supporting elementary school education was still low, both in terms of providing support, support from personnel and material contributions. Associated with supporting education is still limited to a small part of the community namely community leaders, religious leaders, traditional leaders, and some parents of students. (2) Initiatives of community participation in supporting the implementation of school education based on spontaneous and persuasive are still low in the general population, not good enough for community / religious / adat leaders, and for some parents of students at the school. (3) Organizations supporting the community in supporting the implementation of primary school education are still low both individuals and groups. (4) Community assistance programs that support education are also still low such as in terms of supporting, supporting, or supporting programs determined by the school or school institution.*

**Keywords: Community Participation, Implementation of Basic Education**

**Pendahuluan**

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi

dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. UUD 1945 (pasal 31) pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sejak

bergulirnya reformasi, pemerintah melakukan pembaruan sistem pendidikan nasional antara lain adalah memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan

nasional yang diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kemudian diikuti dengan keluarnya beberapa peraturan pemerintah seperti PP. No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, PP. No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP.No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP. No.17 Tahun 2010.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 6 ayat 1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai limabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar “tanpa memungut biaya”, sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan sekadar harapan tetapi merupakan suatu tuntutan mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan, baik dalam lingkup kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Partisipasi masyarakat sebagai bagian yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan

nasional memang sudah cukup jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang berlaku pula dalam hal biaya, maka hal yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan pelibatan (partisipasi) masyarakat agar sesuai dengan harapan demi terwujudnya kualitas pendidikan yang tinggi adalah membangun suatu strategi yang dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya masih merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Prasarana pendidikan (sekolah) yang ada masih belum memadai, dan sekolah-sekolah yang ada juga belum dilengkapi dengan sarana pendidikan yang memadai, serta kekurangan guru. Di lain pihak kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan juga dapat dikatakan masih rendah, bahkan ada kesan sebagian besar masyarakat yang ada terutama di daerah pedalaman belum memberikan perhatian dan kepedulian pada pelaksanaan pendidikan. Rendahnya kemampuan berpikir dan juga kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi pada pelaksanaan pendidikan. Fenomena seperti tersebut di atas dapat ditemui di hampir seluruh wilayah pedalaman di Kabupaten Jayawijaya antara lain di Distrik/Kecamatan Silokarno Doga. Di Distrik ini hanya terdapat dua sekolah dasar yaitu SDN yang berada di Desa/Kampung Ampoffaga, dan SD Inpres yang terletak di Desa/Kampung Holasilih. Sarana dan fasilitas untuk proses pelaksanaan pendidikan di kedua SD tersebut sangat tidak memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Tenaga pendidik (guru) juga dirasakan masih sangat kurang di kedua Sekolah Dasar

tersebut. Untuk memajukan pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar yang ada di Distrik Silokarno Doga tersebut maka pihak pemimpin sekolah dan komite sekolah terus berupaya menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat setempat baik dengan para orang tua murid, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan warga masyarakat yang berkemampuan; dengan harapan dapat menggerakkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di kedua Sekolah Dasar yang ada di Distrik Silokarno Doga. Namun kondisi kehidupan sebagian besar masyarakat Distrik Silokarno Doga yang masih serba terbatas terutama keterbatasan kemampuan berpikir (tidak/kurang berpendidikan memadai) dan keterbatasan kemampuan ekonomi (berpendapatan rendah atau miskin) tentunya dapat merupakan salah kendala utama bagi mereka untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam pelaksanaan pendidikan dasar di kedua SD yang ada di wilayah mereka itu. Dilatarbelakangi oleh beberapa indikasi masalah yang dikemukakan di atas inilah sehingga dalam penulisan skripsi diangkat judul penelitian "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua"

### **Tinjauan Pustaka.**

#### **Konsep Partisipasi.**

Istilah partisipasi merupakan terjemahan dari istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris "*participation*". Menurut Kamus Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai "pengambilan bagian" atau "pengikutsertaan" (Poerwadarminta, 2000). Sehingga itu partisipasi mengandung makna semua pihak yang terkait mengambil bagian atau ikutserta secara aktif berdasarkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama (Marzuki, 2004). Bhattacharyya dalam Taliziduhu (2000) mendefinisikan partisipasi adalah pengambilan bagian dalam kegiatan

bersama. Bornby dalam Theresia, dkk. (2015) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Theodorson dalam Theresia, dkk (2015) mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Mubyarto dalam Taliziduhu (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Pengertian partisipasi dalam pembangunan jika dilihat dari prosesnya mengandung makna "suatu proses dimana para pemilik/pemangku kepentingan (*stakeholders*) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumberdaya yang berdampak pada mereka (Bank Dunia dalam Marzuki, 2004). Jelas dalam pengertian ini bahwa masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek dari semua pembangunan yang ada. Nelson dalam Bryant dan White (2005) mengemukakan, terdapat dua jenis partisipasi, yaitu : pertama, ialah partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu kelompok, yang disebut partisipasi horizontal; dan kedua ialah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan pemerintah, yang disebut partisipasi vertikal. Selanjutnya menurut Davis dalam Taliziduhu (2000), bahwa partisipasi atau keterlibatan kelompok masyarakat sebagai suatu kesatuan, disebut partisipasi kolektif; sedangkan keterlibatan individu-individu dalam kegiatan kelompok, disebut partisipasi individual. Cohen dan Uphoff dalam Taliziduhu (2000) mengemukakan bahwa sifat khas partisipasi itu terutama dikenal dengan gagasan inisiatif (prakarsa) dan inisiatif ini pada satu pihak datang dari bawah (*bottom-up*), dan di pihak yang lain datang dari atas (*top-down*). Partisipasi

*bottom-up* kemungkinan lebih sering sukarela daripada paksaan, sedangkan partisipasi lokal yang *top-down* tindakannya seringkali melibatkan beberapa jenis paksaan. Disamping itu ada juga partisipasi yang didorong melalui imbalan-imbalan tertentu berupa uang jasa, bantuan, penghargaan atau pujian, atau juga yang sifatnya tidak langsung seperti janji-janji dan harapan-harapan di masa datang baik yang bersifat politis ataupun religius dan sebagainya. Cohen dan Uphoff dalam Taliziduhu (2000), bahwa terdapat sembilan tipe partisipasi masyarakat, yaitu :

- (1) Partisipasi sukarela dengan inisiatif dari bawah;
- (2) Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya datang dari bawah;
- (3) Partisipasi desakan atau paksaan (*infosed*) dengan inisiatif dari bawah;
- (4) Partisipasi sukarela (*voluntered*) dengan inisiatif datang dari atas;
- (5) Partisipasi dengan imbalan (*reward*) dengan inisiatif dari atas;
- (6) Partisipasi paksaan dengan inisiatif dari atas;
- (7) Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (*though shred initiative*);
- (8) Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama;
- (9) Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama dari atas dan dari bawah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Dusseldorp dalam Theresia dkk, (2015) menyebutkan adanya beberapa tipe partisipasi masyarakat yaitu :

- (1) Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri;
- (2) Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi;
- (3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana warga pada umumnya; atau partisipasi yang dilakukan untuk memenuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat.
- (4) partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu partisipasi

yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau takut menderita kerugian/tidak memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. (5) Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan yang sudah diperlakukan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah/penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Tentang hal ini, Raharjo dalam Theresia dkk (2015) menegemukakan adanya tiga variasi partisipasi, yaitu :

- (1) Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas;
- (2) Partisipasi penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- (3) Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah/penguasa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka; artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut adanya keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya (Theresia, dkk, 2015).

Taliziduhu (2000) merangkum bentuk-bentuk partisipasi dalam fase-fase proses kegiatan, dengan mengutip pendapat-

pendapat para ahli seperti tersebut di bawah ini, yaitu :

- (a) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain, sebagai awal perubahan.
- (b) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima maupun menolaknya.
- (c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, atau dalam penetapan rencana , atau dalam proses pengambilan keputusan;
- (d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional atau partisipasi dalam implementasi program;
- (e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, atau yang populer disebut partisipasi *in benefit* atau partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil yang sudah dicapai;
- (f) Partisipasi dalam menilai pembangunan, atau partisipasi dalam evaluasi program.

Wilcox dalam Theresia dkk (2015) mengatakan ada lima tingkatan atau tahapan partisipasi masyarakat, yaitu : (1) Memberikan informasi (*information*). (2) Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. (3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. (4) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. (5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dari bentuk atau tahap-tahap partisipasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat itu ialah adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan yang sedang berlangsung mulai dari fase/tahap penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan program, penerimaan atau pemanfaatan hasil, dan pada penilaian pelaksanaan dan hasilnya. Menurut Taliziduhu (2000) bahwa partisipasi yang dilakukan sepanjang proses program dinamakan partisipasi *prosesional*, sedangkan partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase/tahap saja dinamakan partisipasi *parsial*.

### **Konsep Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan dan makna kehidupan.

Menurut La Belle. ( 1976 ) pendidikan dipandang sebagai difusi sikap, informasi, dan ketrampilan belajar yang diperoleh dari partisipasi sederhana dalam program-program yang berbasis masyarakat. Pendidikan diarahkan secara eksternal dan inisiatif sendiri, yang mengarah pada proses yang mana individu-individu belajar untuk fungsi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam lingkungan mereka

Pendidikan pada hakikatnya sebuah usaha di mana peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Tentu dengan harapan agar peserta didik dapat menjadi lebih baik, bisa mengembangkan potensi dirinya dan bermanfaat untuk lingkungannya serta memiliki keterampilan yang bisa bermanfaat. Dengan ilmu, segala persoalan dan problema yang dihadapi manusia akan dengan mudah

dapat terselesaikan. Persoalan-persoalan rumit yang membuat manusia menderita, dengan ilmu akan dapat teratasi.

Chambers ( 1982 ) menekankan pendidikan pada aspek mental dan rasionalitas serta pembentukan martabat yang mulia. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pendidikan adalah proses transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, menekankan pada aspek mental dan rasionalitas, untuk mempersiapkan pekerjaan di masa depan, agar tercapainya martabat yang mulia.

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial. Pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Bahkan pengertian pendidikan lebih luas cakupannya sebagai *aktivitas* dan *fenomena*. Arti pendidikan menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan pendidikan adalah transformasi knowledge, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi agar dapat ditransformasikan kepada generasi berikutnya untuk menjadi pribadi yang siap terjun ke masyarakat, serta menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang disekitarnya.

Untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, pihak sekolah sudah seharusnya aktif menggugah perhatian masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya untuk bersama sama berdiskusi atau bertukar pikiran untuk memecahkan berbagai permasalahan. Komunikasi tentang pendidikan masyarakat tidak cukup hanya dengan informasi verbal saja, tetapi perlu dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditunjukkan kepada masyarakat agar timbul citra positif tentang pendidikan dikalangan mereka, sebab masyarakat pada umumnya ingin bukti nyata sebelum mereka memberikan dukungan. Bukti itu dapat di dapat ditunjukkan berupa pameran hasil produk sekolah, tayangan keberhasilan siswa sebagai juara cerdas cermat, juara olahraga, tayangan penemuan inovatif produktif siswa dan sebagainya.

Adapun beberapa contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan ialah sebagai berikut (Rodiyah, 2013). :

- 1) Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putraputrinnya di rumah dan bila perlu memberi laporan dan

- berkonsultasi dengan pihak-pihak sekolah;
- 2) Menyediakan fasilitas belajar dirumah dan pembimbingan putraputrinnya agar belajar dengan penuh motivasi dan perhatian;
  - 3) Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar dilembaga pendidikan sekolah.
  - 4) Memberikan umpan balik kepada sekolahtentang pendidikan, terutama yang menyangkut keadaan putra-putrinnya
  - 5) Bersedia datang kesekolah bila diundang atau diperlukan oleh sekolah.
  - 6) Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti sarana, prasarana, kegiatan keuangan, program kerja dan sebagainya.
  - 7) Membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan sekolah dalam memajukan proses pembelajaran.
  - 8) Meminjamkan alat-alat yang dibutuhkan sekolah untuk berpraktek, apabila sekolah memerlukannya.
  - 9) Bersedia menjadi tenaga pelatih/narasumber bila diperlukan oleh sekolah.
  - 10) Menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar dilingkungan masyarakat (praktikum misalnya).
  - 11) Memberi layanan/penjelasan kepada siswa yang sedang belajar di masyarakat.
  - 12) Menjadi responden yang baik dan jujur terhadap penelitianpenelitian siswa dan lembaga pendidikan.
  - 13) Bagi ahli pendidikan bersedia menjadi ekspert dalam membina lembaga pendidikan yang berkualitas.
  - 14) Bagi hartawan bersedia menjadi donator untuk pengembangan sekolah.
  - 15) Ikut serta memperlancar komunikasi pendidikan.
  - 16) Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan dan ikut mengontrol jalannya pendidikan (*social control*);
  - 17) Bagi tokoh tokoh masyarakat bersedia menjadi partner menejemen pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga pendidikan.
  - 18) Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan.
- Selain itu Partsipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan memiliki beberapa tingkatan (Rodiyah, 2013) :
- a) Derajat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui adanya suatu usaha sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga maupun materi.
  - b) Prakarsa keterlibatan, yang dapat dibedakan antara keterlibatan spontan dengan persuasi atau melalui paksaan.yaitu tingkat otoritas, yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada kelompok untuk memantapkan keputusannya.Kewenangan tersebut dapat bersipat resmi kalau kelompok memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan.
  - c) Organisasi keterlibatan,yang dapat dibedakan menjadi keterlibatan perseorangan atau secara kelompok.Hal ini dapat dikatakan sebagai tingkat penasehatan/sugesti yang dibangun atas dasar saling mengerti, oleh karena itu para anggota kelompok pada hakekatnya sudah cendrung siap untuk memberikan suatu usul atau saran kalau telah memahami masalah atau situasi yang dihadapkan kepada mereka.
  - d) Sikap dalam keterlibatan, mulai dengan yang mendukung, setuju sampai yang menentang. Hal ini merupakan tingkat saling mengerti yang tujuannya untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing masing fungsi dan sikap yang dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga lebih bertanggung jawab.

Dimensi-dimensi partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Moleong, 2009).

### **Informan Penelitian**

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal.

Informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa unsure yang terkait atau dianggap mengetahui dan memahami obyek yang diteliti, yaitu :

1. Kepala SDN Aprotfaga : 1 orang;
2. Kepala SD Inpres Holasili : 1 orang;
3. Ketua Komite Sekolah : 1 orang;
4. Pemerintah setempat (Kepala Desa) 2 orang;
5. Tokoh Masyarakat/Agama/Adat : 2 orang;
7. Warga Masyarakat (Orang Tua Murid) : 1 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode/teknik kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan : (1)

tersebut dapat diambil sebagai landasan teori/konsep di dalam penelitian ini.

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2009). Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (*data collection*), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*), selanjutnya penyajian data (*data display*), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

Hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah dideskripsikan di atas dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

1. Derajat partisipasi/keterlibatan :
  - a. Keterlibatan dalam memberikan sumbangan pemikiran ke pihak sekolah dasar dalam memajukan pelaksanaan pendidikan di sekolah belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan dalam memberikan sumbangan pemikiran ini masih terbatas pada sebagian kecil masyarakat seperti para tokoh masyarakat/agama, dan juga sebagian masyarakat yang punya anak bersekolah di sekolah tersebut (orang tua murid) sedangkan masyarakat yang tidak punya anak bersekolah tidak ada yang melibatkan diri memberikan sumbangan pemikiran.

- b. Keterlibatan dalam memberikan sumbangan uang/material untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pendidikan di sekolah dasar belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang memberi sumbangan material kebanyakan adalah masyarakat yang kemampuan ekonominya lebih baik dan sebagian orang tua murid; sedangkan masyarakat ekonomi lemah yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat belum/tdak memberikan sumbangan material.
- c. Keterlibatan dalam memberikan sumbangan tenaga umumnya hanya dilakukan oleh warga masyarakat yang punya anak bersekolah (orang tua murid); sedangkan masyarakat lainnya tidak banyak yang melibatkan diri memberikan sumbangan tenaga.

## 2. Prakarsa partisipasi/keterlibatan.

- a. Prakarsa partisipasi/keterlibatan secara spontan dari masyarakat untuk membantu mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Prakarsa partisipasi/keterlibatan secara spontan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti orang berpendidikan dan para tokoh masyarakat/agama.
- b. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah biasanya muncul dari adanya himbuan atau ajakan/persuasi dari pihak sekolah atau pihak pemerintah setempat, dan biasanya ini terdapat pada masyarakat yang punya anak bersekolah di sekolah tersebut (orang tua murid).

## 3. Organisasi partisipasi/keterlibatan :

- a. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar masih lebih banyak dilakukan secara individual terutama oleh orang tua murid.
- b. Organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan/gereja dan organisasi sosial

yang ada sering juga memberikan partisipasi dukungan terhadap program/kegiatan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar, namun masih belum maksimal.

## 4. Sikap dalam partisipasi / keterlibatan .

- a. Masyarakat umumnya punya sikap mendukung atau menyetujui setiap keputusan atau tindakan sekolah untuk memajukan pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar, namun dukungan atau persetujuan itu belum diikuti dengan sumbangan partisipasi/keterlibatan secara nyata.
- b. Tidak pernah ada sikap menolak keputusan atau tindakan sekolah sehubungan dengan upaya memajukan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Masyarakat selalu mendukung namun belum disertai dengan dukungan nyata.

## Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat di Kecamatan/Distrik Silokarno Doga dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar, dilihat empat dimensi tingkatan partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan (Rodiyah, 2013) yaitu : derajat partisipasi/keterlibatan, prakarsa partisipasi/keterlibatan, organisasi partisipasi/keterlibatan, dan sikap dalam partisipasi/keterlibatan.

1. Dimensi Derajat Partisipasi/Keterlibatan :  
Dimensi derajat partisipasi/keterlibatan mengungkapkan tingkat partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah, dimana tingkat terendahnya adalah sekedar mengetahui suatu program/kegiatan sekolah tanpa melibatkan diri secara aktif dalam pelaksanaannya. Tingkat yang lebih tinggi pada dimensi ini adalah ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga maupun materi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah (Rodiyah, 2013). Berdasarkan penelitian di Distrik Silokarno

Doga menunjukkan bahwa partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran ke pihak sekolah dasar dalam memajukan pelaksanaan pendidikan di sekolah belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi/keterlibatan dalam memberikan sumbangan pemikiran ini masih terbatas pada sebagian kecil masyarakat seperti para tokoh masyarakat/agama, dan juga sebagian masyarakat yang punya anak bersekolah di sekolah tersebut (orang tua murid) sedangkan masyarakat yang tidak punya anak bersekolah tidak ada yang melibatkan diri memberikan sumbangan pemikiran. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan uang/material untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pendidikan di sekolah dasar belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang memberi sumbangan material kebanyakan adalah masyarakat yang kemampuan ekonominya lebih baik dan sebagian orang tua murid; sedangkan masyarakat ekonomi lemah yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat belum/tdak memberikan sumbangan material. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan tenaga umumnya hanya dilakukan oleh warga masyarakat yang punya anak bersekolah (orang tua murid); sedangkan masyarakat lainnya tidak banyak yang melibatkan diri memberikan sumbangan tenaga. Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat di Kecamatan Silokarno Doga dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar adalah masih rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal terutama oleh masih rendahnya kemampuan berpikir sebagian besar masyarakat (tidak/kurang berpendidikan memadai), dan oleh kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih rendah. Oleh karena ini ke depan harus adanya strategi yang efektif dari pihak sekolah dan didukung oleh pihak pemerintah setempat untuk menggerakkan dan meningkatkan derajat partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar yang ada di Kecamatan/Distrik Silokarno Doga.

2. Dimensi Prakarsa Partisipasi/Keterlibatan :Dimensi prakarsa partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dapat dibedakan antara keterlibatan spontan dengan keterlibatan persuasi atau melalui paksaan.yaitu tingkat otoritas, yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada kelompok untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan tersebut dapat bersipat resmi kalau kelompok memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan (Rodiyah, 2013). Berdasarkan hasil penelitian di Distrik/ Kecamatan Silokarno Doga menunjukkan bahwa prakarsa partisipasi/keterlibatan secara spontan dari masyarakat untuk membantu mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Prakarsa partisipasi/keterlibatan secara spontan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti orang berpendidikan dan para tokoh masyarakat/ agama. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah biasanya muncul dari adanya himbuan atau ajakan/persuasi dari pihak sekolah atau pihak pemerintah setempat, dan biasanya ini terdapat pada masyarakat yang punya anak bersekolah di sekolah tersebut (orang tua murid). Hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Prakarsa keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar secara spontan masih rendah pada masyarakat biasa namun sudah cukup baik pada tokoh masyarakat/agama/adat, dan pada sebagian orang tua murid di sekolah tersebut. Demikian pula prakarsa keterlibatan dengan persuasi masih rendah pada masyarakat umumnya, dan sudah cukup baik pada tokoh masyarakat/agama/adat, dan sebagian orang tua murid di sekolah tersebut. Kondisi

partisipasi tersebut memberikan implikasi perlunya pihak sekolah dan pemerintah setempat melakukan strategi yang efektif untuk mendorong munculnya partisipasi spontan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar.

### 3. Dimensi organisasi partisipasi/keterlibatan

Dimensi organisasi partisipasi/keterlibatan dapat dibedakan menjadi keterlibatan perseorangan atau keterlibatan secara kelompok. Hal ini dapat dikatakan sebagai tingkat penasehatan/sugesti yang dibangun atas dasar saling mengerti, oleh karena itu para anggota kelompok pada hakekatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul atau saran kalau telah memahami masalah atau situasi yang dihadapkan kepada mereka (Rodiyah, 2013). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar masih lebih banyak dilakukan secara individual terutama oleh orang tua murid. Organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan/gereja dan organisasi sosial yang ada sering juga memberikan partisipasi dukungan terhadap program/kegiatan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar, namun masih belum maksimal. Hasil penelitian ini dapat member kesimpulan bahwa organisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar masih rendah baik secara perorangan maupun secara kelompok. Organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada (seperti organisasi sosial masyarakat, organisasi agama, dan lainnya) belum secara maksimal melibatkan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar yang ada. Oleh karena itu ke depan harus ada kerjasama yang lebih efektif antara pihak sekolah dengan organisasi yang ada dalam masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar.

### 4. Dimensi sikap dalam partisipasi/keterlibatan

Dimensi sikap dalam partisipasi keterlibatan, mulai dengan yang mendukung, setuju sampai yang menentang. Hal ini merupakan tingkat saling mengerti yang tujuannya untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing masing fungsi dan sikap yang dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga lebih bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya punya sikap mendukung atau menyetujui setiap keputusan atau tindakan sekolah untuk memajukan pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar, namun dukungan atau persetujuan itu belum banyak diikuti dengan sumbangan partisipasi/keterlibatan secara nyata. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak pernah ada sikap menolak keputusan atau tindakan sekolah sehubungan dengan upaya memajukan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Masyarakat selalu mendukung namun belum disertai dengan dukungan tindakan nyata. Ini memberikan implikasi perlunya pihak sekolah melakukan sosialisasi dan persuasi untuk memunculkan sikap mendukung secara nyata dari masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar. Pihak sekolah juga harus memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan dukungan.

Gambaran hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan/ Distrik Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar secara umum masih rendah dilihat dari empat dimensi tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan yaitu : derajat partisipasi/ keterlibatan, prakarsa partisipasi/ keterlibatan, organisasi partisipasi/ keterlibatan, dan sikap dalam partisipasi/ keterlibatan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Silokarno Doga Kabupaten Papua dilihat dari empat dimensi partisipasi yaitu : derajat keterlibatan, prakarsa keterlibatan, organisasi keterlibatan, dan sikap dalam keterlibatan. Berdasarkan hasil penelitian di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Derajat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar masih rendah, baik dalam hal memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga maupun sumbangan material. Keterlibatan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan masih terbatas pada sebagian kecil masyarakat yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagian orang tua murid; sedangkan masyarakat lainnya masih sangat minim.
2. Prakarsa keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar secara spontan masih rendah pada masyarakat biasa namun sudah cukup baik pada tokoh masyarakat/agama/adat, dan pada sebagian orang tua murid di sekolah tersebut. Demikian pula prakarsa keterlibatan dengan persuasi masih rendah pada masyarakat umumnya, dan sudah cukup baik pada tokoh masyarakat/agama/adat, dan sebagian orang tua murid di sekolah tersebut.
3. Organisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar masih rendah baik secara perorangan maupun secara kelompok. Organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada (seperti organisasi sosial masyarakat, organisasi agama, dan lainnya) belum secara maksimal melibatkan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar yang ada.

4. Sikap keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan juga masih rendah seperti dalam hal mendukung, menyetujui, ataupun menolak program-program yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau komite sekolah.

### **Saran**

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa sebagai berikut :

1. Derajat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar di Distrik Silokarno Doga harus dapat diciptakan dan ditingkatkan, baik dalam hal memberikan sumbangan pemikiran maupun sumbangan tenaga dan material. Untuk itu pihak sekolah harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan sekolah dasar.
2. Prakarsa partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar perlu ditingkatkan. Pihak sekolah atau komite sekolah harus dapat melakukan tindakan persuasi kepada masyarakat sehingga mereka tergerak berpartisipasi.
3. Organisasi-organisasi yang ada di masyarakat hendaknya dapat dijadikan sarana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar. Untuk itu pihak sekolah harus melibatkan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat (sosial, agama, dan lainnya) dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pendidikan sekolah dasar.
4. Sikap keterlibatan (mendukung, menyetujui, atau menolak/ementang) keputusan pelaksanaan pendidikan yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau komite sekolah harus terus digalakkan di kalangan masyarakat dengan memberikan akses untuk menyampaikan sikap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chamber, 1982, *Konsep Pendidikan* . “ [https : // nie 07 independent . wordpress . com /konsep - pendidikan /](https://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan/) . ( di akses pada tanggal 28 januari 2019 ) .
- Conyers, 1991, *Partisipasi Masyarakat* , [https : // sacafirmansyah. Wordpress . com / 2009 / 06 / 05 / partisipasi – masyarakat /](https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/) ( diakses pada tanggal 3 februari 2019 ) .
- Isbandi, 2007, *Teori Partisipasi, Konsep Partisipasi* . ”. [https : // bulelengkab . go . id / detail / artikel / teori – partisipasi – konsep – partisipasi – masyarakat – dalam – pembangunan – menurut – para – ahli - 10](https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10) . ( diakses pada tanggal 28 januari 2019 ) .
- Kadarisman, 1996, *Konsep Mutu* , . [http : // adarwin 120594 . blogspot . com / 2017 / 04 / konsep -mutu.html](http://adarwin120594.blogspot.com/2017/04/konsep-mutu.html) . ( di akses pada tanggal 20 april 2019 )
- Keith Davis, *Partisipasi* . [https : // id . wikipedia . org / wiki / Partisipasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi) . ( Diakses pada tanggal 03 februari 2019 ) .
- La Belle, 1976, *Konsep Pendidikan* , [https : // silabus . org / konsep – pendidikan /](https://silabus.org/konsep-pondidikan/) . ( Diakses pada tanggal 03 februari 2019 ) .
- Marzuki M., 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T., 1990, *Konsep Dasar Partisipasi* , [https : // bebasbanjir 2025 . wordpress . com / 04 – konsep – konsep – dasar / partisipasi /](https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar-partisipasi/) ( Diakses pada tanggal 03 februari 2019 ) .
- Ohama, Y., 2000, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Poerwadarminta, S., 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Rodiyah St, 2013, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Di Sekolah*, Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Slamet, 2003, *Konsep Partisipasi Masyarakat*, [https : // bulelengkab . go . id / detail / artikel / teori – partisipasi – konsep – partisipasi – masyarakat – dalam – pembangunan – menurut – para – ahli - 10](https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10) . ( diakses pada tanggal 20 februari 2019 ) .
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu Ndraha, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara.
- Theresia, A., Andini, S.K., Nugraha, P.G.P. dan Mardikanto, T. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3.
- Verhangen, 1979 , dalam Mardikanto (2003), *Pengertian Partisipasi* .[http:// turindraatp . blogspot . ml](http://turindraatp.blogspot.ml) ( Diakses pada tanggal 03 februari 2019 ) .
- Wahyudin K., 2004, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Yuwono(2001), *Teori Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan menurut para ahli* . <https://bulelengkab> .

go.id/detail/artike/teori – partisipasi –  
konsep – partisipasi – masyarakat –  
dalam – pembangunan – menurut –

para – ahli - 10 . ( Diakses pada  
tanggal 28 januari 2019 ) .